

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah persentase anak balita di provinsi Sumatera Barat yang mengalami kemiskinan absolut adalah sebesar 89,6 persen anak balita yang terdeprivasi dua atau lebih indikator dimensi pada kebutuhan dasarnya. Sehingga hanya 0,6 persen dari keseluruhan sampel anak balita yang terpenuhi semua kebutuhan dasarnya atau tidak terdeprivasi pada semua indikator dimensi pada kebutuhan dasarnya.
2. Dari hasil model regresi yang dilakukan maka faktor yang signifikan dalam mempengaruhi kemiskinan anak balita di provinsi Sumatera Barat adalah pendidikan kepala rumah tangga, status pekerjaan kepala rumah tangga, pendidikan ibu, wilayah tinggal, dan kemiskinan rumah tangga.
3. Berkaitan dengan pendidikan, pemerintah perlu segera menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun dan merealisasikan program wajib belajar 12 tahun (hingga SLTA) serta terus menggalakkan pendidikan non formal untuk kesetaraan bagi penduduk yang tidak mungkin lagi mengikuti pendidikan formal. Kesenjangan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan akses informasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan harus dikurangi melalui percepatan pembangunan infrastruktur di pedesaan.

1.2 Saran

1. Berkaitan dengan pendidikan, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan perlu melakukan monitoring pelaksanaan dana bos serta sejauh mana penggunaan fasilitas media belajar berupa buku yang bisa diakses di *website* kementerian pendidikan di sekolah-sekolah agar siswa bisa memperoleh buku gratis. Selanjutnya melalui dinas pendidikan kabupaten/kota, pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan mengidentifikasi orang tua yang tidak tamat pendidikan dasar untuk diajak ikut program pendidikan non formal agar rata-rata pendidikan mereka meningkat sehingga wajib belajar sembilan tahun bisa dituntaskan. Agar pemerintah benar-benar merealisasikan program wajib belajar 12 tahun minimal sampai tingkat SLTA di seluruh Indonesia. Selain dengan menggunakan anggaran daerah, hal ini tentu harus didukung oleh pemerintah pusat dalam menganggarkannya melalui APBN untuk program pendidikan di tingkat SLTA agar program tersebut gratis sebagaimana yang telah diterapkan pada program wajib belajar sembilan tahun.
2. Pemerintah daerah agar mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang mudah, murah dan terjangkau terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan.